

Addressing Fragmentation: Integrated Waste Management Synergy Policy at the Green Campus of the State Islamic University of Jakarta

Mengatasi Fragmentasi: Kebijakan Sinergi Tata Kelola Sampah Terpadu Green Campus Universitas Islam Negeri Jakarta

Author's Name* : Sri Mulyati
 Institution/University : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
 Correspondence Author's E-mail : Srinobon@gmail.com

Article History	Received (November 25 th , 2025)	Revised (January 5 th , 2026)	Accepted (February 25 th , 2026)
-----------------	--	---	--

Article News

Keywords:

*Green Campus;
 Environmental
 Management
 System (EMS);
 Integrated Waste
 Management;
 Institutional
 Synergy;
 Rector's Regulation*

Abstract

This policy paper examines the weak implementation of the Green Campus program at UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, which is caused by the lack of synergy between units and faculties in realizing an efficient and sustainable Integrated Solid Waste Management (ISWM) system. Analysis using the USG (Urgency, Seriousness, Growth) method identified that the Green Campus Program Performance is difficult to evaluate objectively as a top priority policy issue (Total Score 15). The root of the problem, mapped using a Fishbone Diagram, is the absence of Environmental Performance Accountability Standards (SAKL), limited human resource capacity, and ad hoc technology procurement policies. To select the best solution, a comparative policy analysis based on William N. Dunn's theory was conducted on five alternatives. The results recommend the Rector's Regulation on the Integrated Environmental Management System (SML) as the most effective intervention (Score 17). This regulation should serve as the primary legal umbrella to eliminate governance fragmentation, mandate the Plan-Do-Check-Act (PDCA) cycle, and integrate KPI development obligations and Monev resource allocation across all units.

Kata Kunci:

*Green Campus;
 Sistem Manajemen
 Lingkungan (SML);
 Pengelolaan
 Sampah Terpadu;
 Sinergitas
 Kelembagaan;
 Peraturan Rektor*

Abstrak

Policy Paper ini mengulas lemahnya implementasi program Green Campus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang diakibatkan oleh kurangnya sinergitas antar unit dan fakultas dalam mewujudkan sistem Pengelolaan Sampah Terpadu (Integrated Solid Waste Management—ISWM) yang efisien dan berkelanjutan. Analisis menggunakan metode USG (Urgency, Seriousness, Growth) mengidentifikasi Kinerja Program Green Campus sulit Dievaluasi secara Objektif sebagai masalah kebijakan prioritas utama (Total Skor 15). Akar masalahnya, yang dipetakan melalui Diagram Fishbone, adalah ketiadaan Standar Akuntabilitas Kinerja Lingkungan (SAKL), terbatasnya kapasitas SDM, dan kebijakan pengadaan teknologi yang bersifat ad hoc.

Untuk memilih solusi terbaik, analisis kebijakan komparatif berdasarkan teori William N. Dunn dilakukan terhadap lima alternatif. Hasilnya merekomendasikan Peraturan Rektor tentang Sistem Manajemen Lingkungan (SML) Terpadu sebagai intervensi paling efektif (Skor 17). Regulasi ini harus menjadi payung hukum utama untuk menghapus fragmentasi tata kelola, mewajibkan siklus *Plan-Do-Check-Act* (PDCA), serta mengintegrasikan kewajiban pengembangan KPI dan alokasi sumber daya Monev di seluruh unit.

To cite this article: Sri Mulyati. (2026). Addressing Fragmentation: Integrated Waste Management Synergy Policy at the Green Campus of the State Islamic University of Jakarta. *AMUYA: Indonesian Journal of Management Reviews*, Vol 2 (1), Page: 243-264.



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](#) ©2025 by author/s

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Perkembangan isu lingkungan global telah menempatkan institusi pendidikan tinggi sebagai agen kunci dalam mendorong keberlanjutan. Konsep *Green Campus* (GC) bukan sekadar tren, melainkan sebuah komitmen institusional untuk mengintegrasikan prinsip ramah lingkungan dalam kebijakan, operasional, dan akademik (Alshuwaikhat & Abubakar, 2008). Bagi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, implementasi *Green Campus* menjadi vital, sejalan dengan visi universitas yang mengedepankan nilai "*Innovation, Green, and Humanity*" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023). Visi ini menuntut langkah nyata dan terukur dalam mewujudkan lingkungan kampus yang efisien, sehat, dan berkelanjutan, bukan hanya sebagai jargon, tetapi sebagai praktik sehari-hari yang melibatkan seluruh sivitas akademika.

Perguruan tinggi memiliki peran ganda: sebagai lembaga penghasil ilmu pengetahuan dan sebagai miniatur masyarakat yang bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitarnya. Sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya Tujuan 11 (Kota dan Permukiman Berkelanjutan) dan Tujuan 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab), kampus harus bertransformasi menjadi laboratorium hidup untuk solusi keberlanjutan (United Nations, 2015). Implementasi *Green Campus* yang efektif menjadi indikator utama komitmen kampus terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan ini, yang pada akhirnya akan membentuk karakter mahasiswa sebagai agen perubahan.

Dalam konteks operasional kampus, pengelolaan sampah sering kali menjadi isu lingkungan yang paling kasat mata dan kompleks. Volume sampah yang dihasilkan oleh ribuan civitas akademika dari berbagai sumber—mulai dari gedung perkuliahan, kantin, asrama, hingga perkantoran—menjadi tantangan keberlanjutan yang signifikan (Damanhuri & Wahyono, 2019). Tanpa sistem pengelolaan yang terstruktur, sampah akan menumpuk, mencemari lingkungan, dan menjadi beban bagi anggaran operasional universitas, sekaligus merusak citra *Green Campus* yang sedang dibangun.

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah berpartisipasi aktif dalam pemeringkatan *UI GreenMetric World University Ranking*, sebuah indikator internasional yang menilai komitmen dan implementasi kampus hijau (*UI GreenMetric*, 2024). Meskipun telah meraih beberapa pencapaian, peringkat ini, khususnya dalam kategori *Waste* (Sampah), memberikan cerminan akan adanya potensi peningkatan. Data tahunan menunjukkan

bahwa perbaikan yang stabil memerlukan kebijakan yang lebih solid dan implementasi yang lebih merata di seluruh unit kampus (Azmi et al., 2022).

Meskipun UIN Jakarta telah memiliki kebijakan formal terkait *Green Campus* dan pengelolaan sampah, muncul indikasi kelemahan signifikan dalam fase implementasi. Program-program yang diinisiasi oleh Pusat Pengembangan *Green Campus* atau unit terkait sering kali terkendala di tingkat operasional. Kelemahan ini bukan hanya disebabkan oleh keterbatasan fasilitas, melainkan lebih fundamental, yaitu pada aspek koordinasi dan integrasi antar pemangku kepentingan (Hardjono, 2017).

Permasalahan inti yang diamati adalah lemahnya sinergitas dan kolaborasi antar unit dan fakultas dalam menjalankan program pengelolaan sampah. Program *Green Campus* seharusnya menjadi tanggung jawab bersama, namun dalam praktiknya, sering kali inisiatif hanya terpusat pada unit pengelola lingkungan, sementara fakultas dan unit penunjang (seperti asrama, kantin, dan sekretariat) hanya berfungsi sebagai objek kepatuhan pasif (Puspitasari, 2021).

Kurangnya sinergitas ini berdampak langsung pada kegagalan sistem pengelolaan sampah terpadu. Sebagai contoh, kebijakan pemilahan sampah di sumber (kantin, kelas, kantor fakultas) sering tidak dipatuhi secara konsisten. Ketika fakultas tidak merasa memiliki tanggung jawab penuh, petugas kebersihan di lapangan terpaksa mencampur kembali sampah terpilah (Hadi, 2017), yang pada akhirnya menggagalkan upaya daur ulang atau pengomposan di tingkat pusat pengolahan.

UIN Jakarta adalah institusi besar yang terdiri dari berbagai fakultas dengan karakteristik dan budaya yang berbeda (misalnya Fakultas Sains dan Teknologi berbeda dengan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan) serta unit penunjang yang beragam (Bank Sampah, *Waste Treatment Center*, asrama, kantin). Keragaman ini memerlukan pendekatan kebijakan yang adaptif namun terpusat. Kegagalan untuk mengakomodasi perbedaan ini dalam kerangka koordinasi yang seragam menghasilkan ketidaksetaraan implementasi di seluruh area kampus (Purwaningrum, 2016).

Salah satu manifestasi dari lemahnya sinergitas adalah tidak adanya mekanisme *monitoring* dan evaluasi (Monev) lintas unit yang terstruktur, periodik, dan transparan. Unit pengelola *Green Campus* kesulitan untuk mengukur dan mempertanggungjawabkan kinerja pengelolaan sampah di setiap fakultas karena tidak ada *Key Performance Indicators* (KPI) yang diwajibkan secara kolektif. Monev yang lemah menghalangi identifikasi titik kritis dan menghambat *feedback loop* yang diperlukan untuk perbaikan berkelanjutan (Bappenas, 2018).

Selain masalah koordinasi, implementasi pengelolaan sampah terpadu juga terhambat oleh isu infrastruktur yang belum optimal. Meskipun tempat sampah terpilah telah tersedia, penempatan, standarisasi warna, dan ketersediaan di titik-titik strategis (misalnya di setiap kelas atau *foodcourt*) sering kali tidak memadai (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020). Ketidakseragaman ini membingungkan pengguna dan menurunkan motivasi untuk melakukan pemilahan yang benar.

Pengelolaan sampah yang ideal harus bersifat terpadu, artinya mencakup seluruh siklus dari sumber hingga pemrosesan akhir (*from cradle to grave*). Sistem yang efisien dan berkelanjutan (3R: *Reduce, Reuse, Recycle*) memerlukan integrasi teknologi (seperti komposter/biodigester), kemitraan yang kuat (misalnya dengan Bank Sampah atau industri daur ulang), dan keterlibatan aktif dari semua pihak (Wiryono, 2019). Kelemahan sinergitas mengganggu aliran siklus ini, sehingga sebagian besar sampah kampus, yang sebenarnya dapat dikurangi atau didaur ulang, berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Permasalahan sinergitas juga merembet pada aspek budaya dan edukasi. Program *Green Campus* akan gagal jika tidak didukung oleh perubahan perilaku. Kurangnya kolaborasi antara unit *Green Campus* dengan fakultas atau unit kemahasiswaan (DEMA/SEMA) menyebabkan kegiatan edukasi dan sosialisasi tidak berjalan masif dan berkelanjutan (Mustofa, 2018). Akibatnya, kesadaran civitas akademika—khususnya mahasiswa—tentang pentingnya pemilahan sampah dan *zero waste* tetap rendah.

Unit-unit bisnis, terutama kantin dan *coffee shop* di lingkungan kampus, merupakan kontributor utama sampah plastik dan sisa makanan (sampah organik). Sinergitas yang lemah terlihat dari ketidakmampuan Unit *Green Campus* untuk secara tegas dan kolektif mengimplementasikan kebijakan *single-use plastic free* atau mewajibkan penggunaan wadah ramah lingkungan di semua *tenant* secara seragam dan konsisten (Setiawan, 2020).

Untuk mengatasi kompleksitas ini, dibutuhkan kerangka kebijakan holistik yang tidak hanya fokus pada penyediaan fasilitas (perangkat keras) tetapi juga pada penguatan institusi dan koordinasi (perangkat lunak). Kegagalan sistemik saat ini menunjukkan bahwa kebijakan yang ada belum cukup kuat untuk memaksa atau menginsentifkan kerja sama dan kepatuhan yang menyeluruh dari seluruh unit di bawah naungan rektorat (Jannah, 2019).

Implementasi *Green Campus* yang lemah, khususnya dalam isu sampah, memiliki dampak negatif terhadap reputasi UIN Jakarta di mata publik, calon mahasiswa, dan mitra internasional. Kampus yang gagal mengelola sampahnya sendiri akan dianggap kurang kredibel dalam menjalankan tri dharma perguruan tinggi, terutama dalam hal pengabdian masyarakat dan penerapan ilmu lingkungan (Firdaus, 2019).

Dengan demikian, inti masalah yang perlu dipecahkan melalui *policy paper* ini adalah: Bagaimana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dapat memperkuat sinergitas antar unit dan fakultas melalui intervensi kebijakan yang strategis, sehingga mampu mewujudkan sistem pengelolaan sampah terpadu yang benar-benar efisien, terukur, dan berkelanjutan.

Analisis kebijakan ini bertujuan untuk membedah akar permasalahan dari sisi kelembagaan dan koordinasi, serta mengidentifikasi opsi-opsi kebijakan yang paling layak dan realistis untuk diterapkan di UIN Jakarta. Fokus utamanya adalah merancang ulang mekanisme kerja sama yang dapat menjamin tanggung jawab kolektif dalam program *Green Campus*.

Policy paper ini sangat relevan sebagai masukan strategis bagi pimpinan universitas (Rektor, Wakil Rektor, dan Dekan). Rekomendasi yang ditawarkan akan berorientasi pada tindakan yang dapat segera dieksekusi, membutuhkan dukungan politik tertinggi, dan melibatkan alokasi sumber daya yang lebih terarah untuk program keberlanjutan.

Secara teoritis, *policy paper* ini berkontribusi pada literatur implementasi kebijakan lingkungan di sektor pendidikan tinggi, khususnya studi kasus pada perguruan tinggi keagamaan Islam. Secara praktis, hasil dari *policy paper* ini diharapkan menjadi panduan aksi untuk mengatasi diskoneksi struktural dan operasional dalam program *Green Campus* UIN Jakarta.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, isu lemahnya implementasi program *Green Campus* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam menciptakan sinergitas antarunit dan fakultas dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah terpadu yang efisien dan berkelanjutan di lingkungan kampus merupakan masalah kebijakan yang mendesak dan harus segera diatasi dengan proposal kebijakan yang komprehensif, terstruktur, dan berbasis kolaborasi institusional.

Kelemahan sinergitas antarunit ini memiliki manifestasi empiris yang jelas, terutama pada tahap pemilahan sampah di sumber. Laporan operasional internal sering menunjukkan bahwa meskipun tempat sampah terpilah telah disediakan di depan gedung fakultas atau di kantin, sebagian besar sampah tetap tercampur (Suparman & Hidayat, 2021). Kondisi ini mengindikasikan bahwa komitmen kebijakan tidak diterjemahkan menjadi tindakan kolektif. Civitas akademika, yang berada di bawah pengawasan langsung fakultas, kurang termotivasi atau kurang teredukasi untuk mematuhi aturan pemilahan, menunjukkan kegagalan kolaborasi antara Unit *Green Campus* (pembuat kebijakan) dengan Fakultas (pelaksana di lapangan).

Kegagalan pemilahan di tingkat sumber menciptakan *bottleneck* (kemacetan) serius di tingkat pengangkutan dan pengolahan. Ketika sampah yang dikumpulkan sudah tercampur, proses selanjutnya menjadi tidak efisien. Petugas kebersihan harus melakukan pemilahan ulang, yang memakan waktu, biaya, dan mengurangi kualitas bahan daur ulang (Azizah, 2022). Hal ini kontras dengan prinsip pengelolaan sampah terpadu yang mensyaratkan bahwa pemilahan harus dilakukan sejak dari sumber untuk memaksimalkan nilai ekonomi dan lingkungan dari sampah yang terpilah.

Banyak perguruan tinggi yang sukses dalam program *Green Campus* menerapkan model tata kelola desentralisasi yang terkoordinasi secara sentral. Mereka mengintegrasikan *reward* dan *punishment* yang terukur untuk setiap fakultas berdasarkan kinerja lingkungan mereka (Syafi'i, 2020). Ketidakhadiran model koordinasi yang kuat seperti ini di UIN Jakarta menyebabkan fakultas merasa tidak memiliki kepentingan langsung terhadap isu sampah, selain hanya melaksanakan tugas kepatuhan minimum.

Solusi atas masalah ini terletak pada penguatan integrasi vertikal (dari Rektorat/Unit *Green Campus* ke Dekanat/Fakultas) dan integrasi horizontal (antarunit penunjang, seperti Biro Administrasi Umum, Asrama, dan Unit Bisnis Kampus). Saat ini, koordinasi cenderung bersifat instruktif satu arah, bukan kolaboratif multi-arah. Integrasi yang efektif memerlukan saluran komunikasi reguler, *shared responsibility*, dan anggaran bersama untuk proyek-proyek pengelolaan sampah (Wibisono, 2018).

Untuk mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan, Bank Sampah Kampus dan Unit Pengolah Sampah harus difungsikan secara optimal. Namun, unit-unit ini tidak akan bisa beroperasi efisien jika *supply* (pasokan) bahan terpilah dari fakultas tidak stabil dan berkualitas rendah. Lemahnya sinergitas antarunit secara langsung mengganggu rantai pasok daur ulang ini, menjadikan Bank Sampah hanya sebagai tempat penampungan pasif, bukan pusat aktivitas ekonomi sirkular yang produktif (Hartono, 2019).

Ketiadaan sinergitas yang terstruktur turut menghambat akuntabilitas dan transparansi kinerja lingkungan universitas. Civitas akademika, mitra, dan publik eksternal berhak mengetahui seberapa efektif setiap fakultas berkontribusi pada pengurangan sampah. Tanpa sistem pelaporan yang terintegrasi (misalnya, data volume sampah yang diolah per fakultas), universitas kesulitan untuk menunjukkan bukti kemajuan *Green Campus*-nya kepada pihak eksternal, termasuk kepada UI GreenMetric (Pratama, 2021).

Program pengelolaan sampah yang efisien harus memiliki elemen keberlanjutan finansial. Sampah yang terpilah dan diolah dengan baik (kompos, penjualan bahan daur ulang) dapat mengurangi biaya pembuangan ke TPA dan bahkan menghasilkan pendapatan. Namun, sistem ini hanya dapat berjalan jika seluruh unit kampus berkontribusi dalam pemilahan. Lemahnya sinergitas dalam pemilahan menyebabkan sampah yang harus dibuang ke TPA tetap tinggi, yang berarti program *Green Campus* masih menjadi beban biaya, bukan solusi ekonomi (Sari, 2020).

Inti dari masalah implementasi ini adalah kurangnya rasa kepemilikan (*sense of ownership*) terhadap program *Green Campus* di tingkat fakultas dan unit. Program ini masih dianggap sebagai proyek Unit GC, bukan sebagai nilai inti dan tanggung jawab operasional masing-masing unit. Rekomendasi kebijakan yang akan disajikan harus bertujuan untuk melembagakan kepemilikan ini melalui kebijakan yang mengikat dan memberikan insentif kinerja (Sukmana, 2022).

Oleh karena kelemahan implementasi bersumber dari tata kelola (sinergitas) dan bukan hanya fasilitas, maka diperlukan intervensi kebijakan yang tegas, terpusat, dan mengikat di bawah kewenangan Rektorat. Intervensi ini harus mendefinisikan secara eksplisit peran, tanggung jawab, dan sanksi bagi setiap unit dalam pengelolaan sampah terpadu, mengubahnya dari anjuran menjadi kewajiban institusional yang terintegrasi dalam sistem evaluasi kinerja dekanat dan unit (Ristiani, 2023).

Berdasarkan analisis komprehensif dari tantangan tata kelola dan operasional di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *policy paper* ini berfokus pada penyajian rekomendasi strategis untuk mengatasi lemahnya sinergitas antarunit sebagai kunci untuk mewujudkan sistem pengelolaan sampah terpadu yang efisien dan berkelanjutan. Solusi yang ditawarkan akan menjadi jembatan antara visi *Green Campus* UIN Jakarta dengan realitas implementasi di lapangan.

Identifikasi Masalah

1. Belum ada alur pengelolaan sampah dari hulu ke hilir di berbagai fakultas dan unit pendukung

Struktur tata kelola program *Green Campus* cenderung tidak terintegrasi secara horizontal dan vertikal, yang berarti tidak ada satu unit otoritas tunggal yang memiliki mandat kuat untuk mengawasi dan mengkoordinasikan seluruh alur pengelolaan sampah dari hulu ke hilir di berbagai fakultas dan unit pendukung. Akibatnya, kebijakan dan inisiatif pengelolaan sampah sering kali tumpang tindih atau berjalan sendiri-sendiri, seperti adanya pemilahan di tingkat fakultas tanpa didukung oleh sistem pengumpulan dan pengolahan terpusat yang memadai di tingkat universitas, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas program secara keseluruhan (Kamaruddin et al., 2022).

2. Belum Mampu Mendorong Inovasi dalam Pengolahan Sampah Berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle)

Belum adanya peraturan rektor atau kebijakan universitas yang mengikat, spesifik, dan terukur mengenai kewajiban pemilahan, pengumpulan, dan pengolahan sampah terpadu bagi seluruh sivitas akademika, termasuk sanksi yang jelas bagi pelanggaran. Ketidakjelasan regulasi ini menyebabkan partisipasi bersifat sukarela dan tidak konsisten, serta gagal mendorong inovasi dalam pengolahan sampah berbasis 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), karena tidak ada mekanisme akuntabilitas yang memaksa perubahan perilaku dan investasi infrastruktur (Arif et al., 2020).

3. Kurangnya Kesadaran Kolektif serta Minimnya Kontribusi Solusi Berbasis Ilmu Pengetahuan dari Para Ahli di Lingkungan Kampus.

Program *Green Campus* tidak sepenuhnya terintegrasi dalam kurikulum akademik dan riset, yang mengakibatkan kurangnya kesadaran kolektif serta minimnya kontribusi solusi berbasis ilmu pengetahuan dari para ahli di lingkungan kampus itu sendiri. Kebijakan yang tidak mewajibkan penelitian aplikatif pada isu pengelolaan sampah kampus dan minimnya *living laboratory* atau fasilitas

percontohan pengolahan sampah berbasis teknologi (misalnya komposting atau biodigester) sebagai media pembelajaran, menyebabkan pengetahuan dan inovasi tidak diterjemahkan menjadi solusi praktis di lapangan (Yusuf & Kurniawan, 2019).

4. Kinerja Program Green Campus sulit Dievaluasi Secara Objektif.

Tidak adanya kebijakan yang menetapkan indikator kinerja utama (KPI) yang jelas, periodik, dan transparan untuk mengukur tingkat sinergi program dan efisiensi pengolahan sampah (misalnya persentase sampah yang didaur ulang, atau pengurangan volume TPA). Dampaknya, kinerja program *Green Campus* sulit dievaluasi secara objektif, sehingga rekomendasi kebijakan berbasis data untuk perbaikan sinergi dan efektivitas pengolahan sampah terpadu tidak dapat dirumuskan dan diterapkan secara tepat waktu (Hidayat et al., 2023).

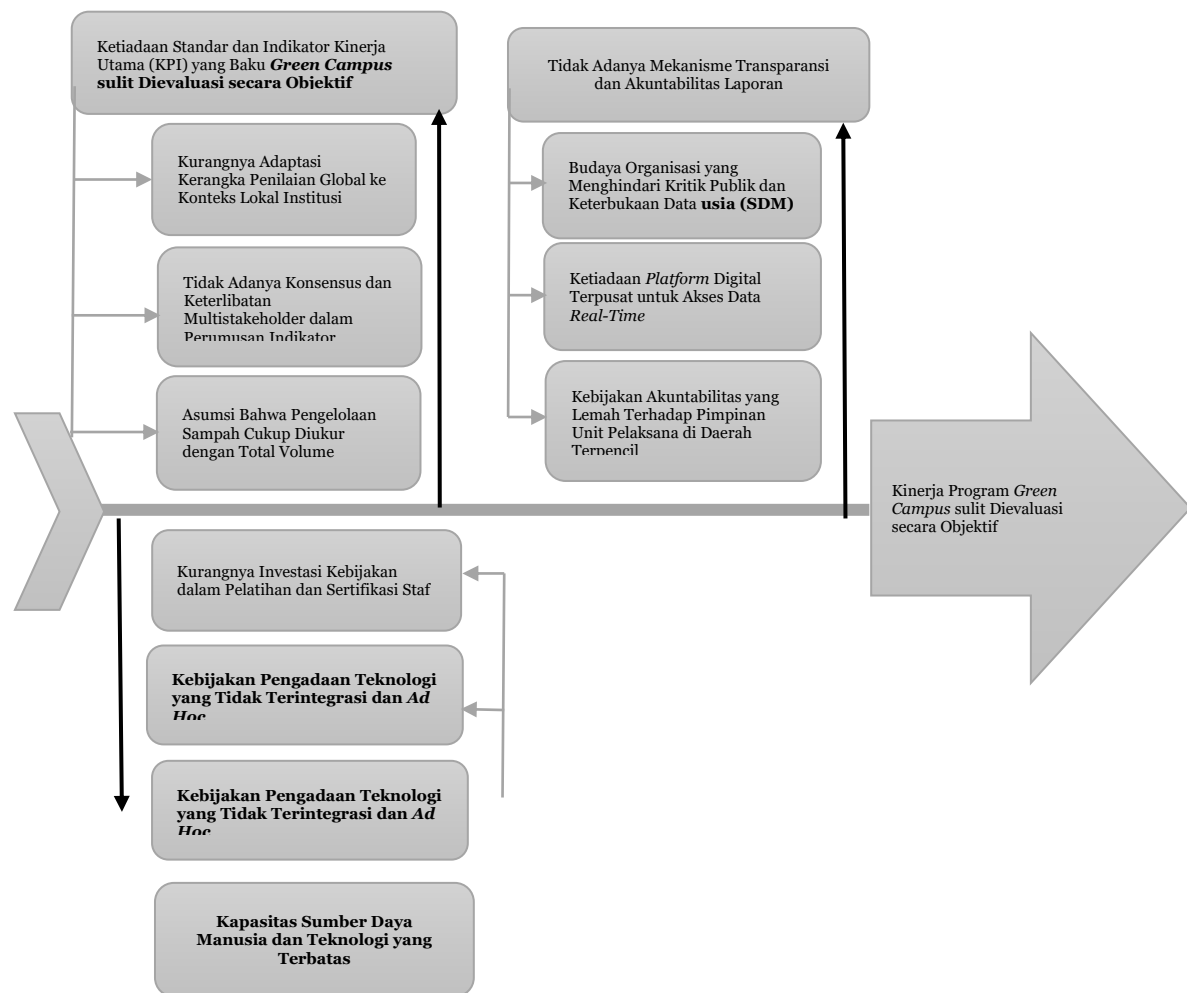
Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dianalisis menggunakan metode USG (*Urgency, Seriousness, Growth*) untuk menentukan prioritas penanganannya. Penilaian menggunakan skala 1-5, di mana 1 adalah sangat rendah dan 5 adalah sangat tinggi, sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 1. Analisis *Urgency, Seriousness, Growth* (USG)

No	Masalah Utama	U	S	G	Total Skor
1	Belum ada alur pengelolaan sampah dari hulu ke hilir di berbagai fakultas dan unit pendukung	5	5	4	14
2	Belum Mampu Mendorong Inovasi dalam Pengolahan Sampah Berbasis 3R (<i>Reduce, Reuse, Recycle</i>)	5	3	5	13
3	Kurangnya Kesadaran Kolektif serta Minimnya Kontribusi Solusi Berbasis Ilmu Pengetahuan dari Para Ahli di Lingkungan Kampus	4	4	4	12
4	Kinerja Program <i>Green Campus</i> sulit Dievaluasi secara Objektif	5	5	5	15

Berdasarkan hasil analisis USG di atas, masalah kebijakan nomor 4 (Kinerja Program *Green Campus* Sulit Dievaluasi secara Objektif) menjadi prioritas utama yang harus segera diatasi. Ini memiliki total skor tertinggi (15), menandakan bahwa masalah ini paling mendesak, paling serius dampaknya, dan akan memburuk paling cepat jika tidak ditangani.

Adapun akar masalah “Kinerja Program *Green Campus* sulit Dievaluasi secara Objektif” dapat diilustrasikan dalam bentuk diagram *fishbone* sebagai berikut:



Gambar 1. Diagram *Fishbone*

Rumusan Masalah

Berdasarkan akar masalah di atas, maka yang menjadi *problem statement* yang di-*highlight* pada artikel kebijakan ini bahwa kurangnya sistem monitoring dan evaluasi kinerja (Monev) yang efektif dan akuntabel dalam program *Green Campus* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berakar pada ketiadaan kebijakan investasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dalam audit lingkungan dan analisis data, serta diperparah oleh kebijakan pengadaan teknologi yang bersifat *ad hoc* dan tidak terintegrasi dalam rencana induk universitas.

Tujuan dan Manfaat Kajian

Tujuan Kajian:

1. Mengidentifikasi dan Menganalisis akar permasalahan utama yang menyebabkan kegagalan implementasi *Integrated Solid Waste Management* (ISWM) akibat lemahnya koordinasi dan sinergitas kelembagaan di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Mengevaluasi Alternatif Kebijakan yang tersedia, termasuk analisis biaya dan manfaat, untuk menentukan intervensi kebijakan yang paling efektif, efisien, dan layak diterapkan untuk memperkuat tata kelola *Green Campus*.
3. Merumuskan Rekomendasi Kebijakan strategis berupa penerbitan Peraturan Rektor tentang Sistem Manajemen Lingkungan (SML) Terpadu yang dapat menjamin integrasi, akuntabilitas, dan kesinambungan program pengelolaan sampah di seluruh unit dan fakultas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Manfaat Kajian:

1. Manfaat Praktis (Institusional)

Sebagai Masukan Kebijakan Langsung: Memberikan rekomendasi konkret dan berbasis bukti kepada pimpinan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Rektor/Wakil Rektor) dalam rangka merevisi atau membentuk regulasi baru (Peraturan Rektor SML) untuk memperbaiki kinerja program *Green Campus*.

Peningkatan Kinerja ISWM: Menciptakan kerangka tata kelola baru yang sinergis, sehingga pengelolaan sampah terpadu (pemilahan, pengangkutan, pemrosesan) menjadi lebih efisien dan berkelanjutan.

Peningkatan Akuntabilitas dan *Image*: Meningkatkan akuntabilitas kinerja lingkungan seluruh unit dan fakultas, yang pada akhirnya akan meningkatkan peringkat UIN Jakarta dalam penilaian UI GreenMetric dan memperkuat citra kampus sebagai institusi yang berwawasan lingkungan.

2. Manfaat Teoritis (Keilmuan)

Kontribusi pada Ilmu Kebijakan Publik: Memberikan sumbangan pemikiran dan studi kasus yang kaya mengenai implementasi kebijakan lingkungan di sektor pendidikan tinggi, khususnya terkait model *Collaborative Governance* dan mengatasi fragmentasi implementasi kebijakan.

Pengembangan Model Analisis: Mendemonstrasikan penggunaan analisis *Urgency, Seriousness, Growth* (USG) dan teori William N. Dunn dalam perumusan kebijakan yang relevan dengan isu keberlanjutan.

3. Manfaat Sosial

Meningkatkan Kesadaran: Mendorong seluruh sivitas akademika (dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan) untuk terlibat aktif dalam praktik pengelolaan sampah yang berkelanjutan, menciptakan lingkungan kampus yang lebih sehat, dan menjadikannya sebagai *living lab* bagi masyarakat.

KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

Kerangka Teori

1. Kurangnya Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja (Monev)

Secara teoritis, kegagalan Monev mencerminkan kelemahan dalam aspek Akuntabilitas dan Tata Kelola Keberlanjutan (*Sustainability Governance*). Monev yang efektif, khususnya menggunakan Indikator Kinerja Utama (KPI) lingkungan, sangat krusial untuk memastikan bahwa upaya keberlanjutan kampus tidak hanya bersifat seremonial (*greenwashing*), tetapi juga terukur dan memiliki dampak

nyata (*substantive action*) (Lozano et al., 2013). Kurangnya Monev yang sistematis melanggar prinsip *PDCA* (*Plan-Do-Check-Act*) dan menghambat *organizational learning*, sehingga program tetap berada pada fase *Do* tanpa pernah memasuki fase *Check* dan *Act* untuk perbaikan (Disterheft et al., 2012).

2. Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Terbatas

Masalah ini berkaitan erat dengan teori Kapital Manusia Lingkungan (*Environmental Human Capital*) dan Kompetensi Keberlanjutan (*Sustainability Competencies*). Keberhasilan inisiatif *Green Campus* sangat bergantung pada ketersediaan SDM yang tidak hanya memiliki kesadaran, tetapi juga kompetensi teknis (pengetahuan dan keterampilan) untuk mengelola data, mengoperasikan teknologi, dan melakukan audit lingkungan secara profesional (Lukman et al., 2017). Keterbatasan pelatihan dan insentif karir menciptakan kesenjangan kompetensi, yang membuat unit pelaksana tidak mampu mengumpulkan data Monev yang valid dan tidak kredibel, sehingga melemahkan seluruh proses evaluasi (Teixeira et al., 2022).

3. Kebijakan Pengadaan Teknologi yang Tidak Terintegrasi dan *Ad Hoc*

Aspek ini didukung oleh teori Sistem Informasi Manajemen Lingkungan (SIML) (*Environmental Management Information Systems—EMIS*) dan Infrastruktur Hijau (*Green Infrastructure*). SIML yang terintegrasi (seperti *platform* digital terpusat dan perangkat keras cerdas) adalah prasyarat teknologi untuk mencapai Monev yang transparan dan *real-time* (Alshuwaikhat & Abubakar, 2008). Ketika kebijakan pengadaan teknologi dilakukan secara *ad hoc* (parsial dan tidak terencana), hal ini menciptakan *data silos*—yaitu data kinerja yang tersebar dan tidak dapat dikomunikasikan antarunit—sehingga mustahil mencapai sinergi dalam pengelolaan sampah terpadu yang membutuhkan *input* dan *output* data dari berbagai titik kampus (Baky et al., 2023).

Kerangka Konseptual

1. Sistem Monev sebagai Jantung Sinergi Program

Secara konseptual, Sistem Monitoring dan Evaluasi (Monev) berfungsi sebagai "jantung" dari *Program Sinergi*, bukan hanya sebagai alat pelaporan. Konsep Monev yang lemah menciptakan *Conceptual Barrier* terhadap sinergi karena tidak ada metrik bersama untuk mengukur kontribusi masing-masing unit (fakultas, unit fasilitas, lembaga penelitian) terhadap satu tujuan tunggal (pengurangan TPA) (Mehmood et al., 2021). Tanpa data kinerja yang kredibel dan terpusat, mekanisme *feedback loop* untuk perbaikan program menjadi terputus, sehingga unit-unit pelaksana tidak memiliki informasi untuk menyelaraskan upaya mereka, yang pada akhirnya melanggengkan fragmentasi dan inefisiensi pengelolaan sampah.

2. SDM dan Teknologi sebagai *Enabler* Kapasitas Institusional

Akar masalah keterbatasan SDM dan Teknologi dilihat sebagai kegagalan dalam membangun *Enabling Capacity* atau Kapasitas Institusional yang diperlukan untuk menjalankan program yang kompleks. Konsep ini menegaskan bahwa kebijakan yang efektif tidak hanya membutuhkan niat, tetapi juga kemampuan operasional (SDM dan Teknologi) untuk menerjemahkan niat menjadi tindakan terukur (Lozano, 2020). SDM yang kompeten dalam analisis data dan teknologi terintegrasi (seperti sensor dan *dashboard* digital) adalah *enabler* utama yang memungkinkan *data-driven decision-making* dalam Monev (Geng et al., 2017). Tanpa *enabler* ini,

program *Green Campus* UIN Jakarta tetap berada pada tataran simbolis tanpa mencapai level *substantive implementation* yang didukung data.

3. Kebijakan Teknologi *Ad Hoc* Melawan Prinsip Pengelolaan Terpadu

Masalah Kebijakan Pengadaan Teknologi yang *Ad Hoc* (tidak terintegrasi) secara konseptual bertentangan dengan prinsip utama Pengelolaan Sampah Terpadu (*Integrated Solid Waste Management—ISWM*). Konsep ISWM memerlukan pendekatan holistik, di mana semua tahapan (pemilahan, pengumpulan, pengolahan, Monev) terhubung secara sistematis (Tchobanoglous et al., 1993). Kebijakan teknologi yang parsial menciptakan hambatan informasi (*Information Silos*), di mana data dari satu tahap tidak dapat mengalir mulus ke tahap Monev dan unit pengambil keputusan lainnya (Sanjaya & Rismayadi, 2022). Akibatnya, upaya daur ulang di satu fakultas tidak terkoordinasi dengan kebutuhan pengolahan di pusat komposting kampus, yang merupakan manifestasi nyata dari kurangnya sinergi yang didorong oleh kegagalan teknologi terintegrasi.

4. Teori Implementasi Kebijakan (*Top-Down vs. Bottom-Up*)

Isu tentang lemahnya implementasi kebijakan *Green Campus* (GC) dapat dianalisis menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan.

Model *Top-Down*: Model ini menekankan bahwa kegagalan implementasi sering terjadi karena adanya diskoneksi antara formulasi kebijakan di tingkat atas (Rektorat/Unit GC) dengan pelaksana di tingkat bawah (Fakultas dan unit teknis). Kebijakan *Green Campus* UIN Jakarta mungkin telah dirumuskan secara ideal, tetapi implementasinya lemah karena:

Ambiguitas dan Inkonsistensi Sasaran: Fakultas tidak menerima panduan operasional yang jelas, seragam, dan terukur mengenai pengelolaan sampah.

Kurangnya Sumber Daya yang Ditetapkan: Tidak ada alokasi sumber daya (anggaran, personel, waktu) yang memadai dan terpisah untuk unit-unit di bawahnya agar dapat melaksanakan program GC secara spesifik (Van Meter & Van Horn, 1975).

Aplikasi pada Isu: Lemahnya sinergitas adalah bukti bahwa kebijakan GC bersifat instruktif dari atas namun tidak didukung oleh mekanisme *accountability* dan koordinasi yang memadai, sehingga kebijakan tersebut "terhenti" di tingkat eksekutif fakultas tanpa *sense of ownership* yang kuat.

5. Konsep *Collaborative Governance* (Tata Kelola Kolaboratif)

Isu sinergitas antarunit dan fakultas secara langsung berkaitan dengan kegagalan penerapan *Collaborative Governance*. Konsep ini menyatakan bahwa untuk memecahkan masalah publik yang kompleks (seperti pengelolaan sampah di kampus besar), diperlukan interaksi yang intensif dan sinergis antara berbagai aktor (Fakultas, Unit GC, Mahasiswa, Staf, Kantin) yang memiliki tujuan bersama tetapi sumber daya dan kepentingan yang berbeda (Ansell & Gash, 2008).

Prinsip Kolaborasi yang Gagal: Sinergitas gagal karena:

Tidak Adanya *Shared Understanding*: Setiap fakultas/unit masih melihat sampah sebagai masalah *mereka* sendiri, bukan masalah bersama yang memerlukan solusi terpadu.

Ketiadaan Arena Kolaborasi Formal: Tidak ada forum atau mekanisme reguler (misalnya, Tim Satgas Sampah Lintas Fakultas) yang memiliki otoritas untuk membuat keputusan kolektif dan menindaklanjuti kinerja pengelolaan sampah (Emerson et al., 2012).

Aplikasi pada Isu: Pengelolaan sampah terpadu yang efisien memerlukan keputusan bersama mengenai standarisasi infrastruktur, jadwal pengangkutan, dan pengawasan. Jika sinergitas lemah, maka keputusan tersebut gagal diimplementasikan secara kolektif di seluruh area kampus.

6. Model Pengelolaan Sampah Terpadu (*Integrated Solid Waste Management - ISWM*) ISWM adalah kerangka operasional yang menjadi standar global untuk pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Model ini tidak hanya berfokus pada pembuangan akhir, tetapi menekankan pada integrasi dari tiga elemen kunci secara hierarkis: Sumber (Teknik), Sistem (Kebijakan dan Kelembagaan), dan Peserta (Sosial-Budaya) (Tchobanoglous et al., 2015).

Hierarki ISWM yang Terganggu:

Teknikal/Operasional: Pemilahan sampah di sumber (fakultas) adalah langkah teknik pertama. Kegagalan di sini membuat semua langkah berikutnya (pengomposan, daur ulang) menjadi tidak efisien.

Kelembagaan/Sistem: Lemahnya sinergitas antar unit adalah kegagalan pada elemen sistem dan kelembagaan. Ini menghambat kemampuan universitas untuk merancang dan menegakkan kebijakan yang mengikat dan terpadu.

Sosial/Budaya: Kurangnya sinergitas kelembagaan gagal mendorong perubahan perilaku dan budaya kampus (*social participation*).

METODOLOGI

Kajian kebijakan ini disusun menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kualitatif-analitis yang berorientasi pada pemecahan masalah (Problem-Solving Orientation) dalam kebijakan publik, sesuai kerangka kerja yang dikembangkan oleh William N. Dunn (2018). Pendekatan ini dipilih karena fokusnya pada diagnosis masalah, perumusan alternatif solusi, dan rekomendasi kebijakan yang didasarkan pada analisis sistematis, bukan sekadar deskripsi fenomena. Prosedur penulisan dimulai dari identifikasi masalah, dilanjutkan dengan pemetaan kausalitas, evaluasi alternatif, hingga perumusan rekomendasi final.

Tahap awal kajian adalah penentuan prioritas masalah inti dari lemahnya implementasi program Green Campus. Penentuan prioritas ini dilakukan melalui Analisis USG (*Urgency, Seriousness, Growth*) untuk mengukur tingkat kedaruratan, dampak, dan potensi perkembangan masalah jika tidak ditangani segera. Setelah masalah kebijakan utama ditetapkan, dilakukan Analisis Kausalitas menggunakan alat Diagram *Fishbone* (Ishikawa, 1990) untuk menguraikan akar-akar penyebab fragmentasi sinergitas kelembagaan dalam pengelolaan sampah terpadu (ISWM). Sumber data primer yang digunakan meliputi dokumen internal UIN Jakarta (Renstra, Peraturan Rektor yang sudah ada, dan laporan kinerja) serta hasil wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan kunci.

Selanjutnya, kajian ini memasuki tahap perumusan dan evaluasi alternatif kebijakan. Berdasarkan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (1975), lima alternatif kebijakan dikembangkan untuk mengatasi akar masalah yang telah dipetakan, mulai dari intervensi regulasi hingga peningkatan kapasitas. Evaluasi terhadap kelima alternatif tersebut dilakukan secara komparatif dengan mempertimbangkan tiga kriteria utama: efektivitas (kemampuan mencapai tujuan), efisiensi (rasio biaya dan hasil), dan kelayakan (aspek politik, teknis, dan finansial) dalam konteks lingkungan kampus.

Alternatif kebijakan yang direkomendasikan secara definitif adalah penerbitan Peraturan Rektor tentang Sistem Manajemen Lingkungan (SML) Terpadu. Tahap akhir ini melibatkan perancangan rekomendasi implementatif. Rekomendasi tidak hanya mencakup substansi regulasi, tetapi juga strategi implementasi yang terperinci, termasuk penentuan unit otoritas tunggal (implementing agency), mekanisme monitoring dan evaluasi (Monev) kinerja berbasis Indikator Kinerja Utama (KPI) yang terukur, serta strategi sosialisasi kebijakan baru kepada seluruh fakultas dan unit pendukung, sejalan dengan prinsip *Collaborative Governance* (Ansell & Gash, 2008).

Referensi teoritis utama yang menopang metodologi ini mencakup kerangka kerja analisis kebijakan Dunn (2018), model implementasi dari Van Meter dan Van Horn (1975), serta konsep tata kelola kolaboratif dari Ansell dan Gash (2008). Penggunaan sitasi mengikuti pedoman APA *7th Edition*. Keterlibatan dokumen internal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2023) sebagai data primer memastikan bahwa kebijakan yang diusulkan selaras dengan visi, misi, dan kerangka perencanaan strategis institusi.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan

Implementasi program *Green Campus* (GC) di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, meskipun telah tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), menghadapi tantangan fundamental yang berpusat pada lemahnya sinergitas antar unit dan fakultas dalam pengelolaan sampah terpadu (*Integrated Solid Waste Management*—ISWM). Permasalahan ini bukan sekadar isu teknis kebersihan, melainkan kegagalan implementasi kebijakan yang bersifat kelembagaan (Alshuwaikhat & Abubakar, 2008). Tanpa koordinasi yang kuat, upaya pemilahan sampah di sumber (fakultas) menjadi sia-sia, dan mayoritas timbulan sampah tetap berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Untuk mengidentifikasi isu kebijakan yang paling krusial, digunakan Analisis USG (*Urgency, Seriousness, Growth*). Hasil analisis menunjukkan bahwa masalah “Kinerja Program *Green Campus* sulit Dievaluasi secara Objektif” memperoleh skor tertinggi (Skor 15). Ini mengindikasikan bahwa masalah tersebut memiliki dampak serius terhadap citra dan komitmen institusi, mendesak untuk diselesaikan, dan berpotensi memburuk seiring bertambahnya timbulan sampah dan tuntutan akuntabilitas publik.

Tingginya skor USG 15 mencerminkan kegagalan kampus dalam mencapai metrik kunci keberlanjutan yang dituntut oleh visi institusi dan standar global. Secara spesifik, kesulitan evaluasi ini secara langsung menghambat peningkatan peringkat UIN Jakarta dalam UI GreenMetric, yang sangat bergantung pada data kinerja yang terukur dan terverifikasi (UI GreenMetric, 2024). Sulitnya evaluasi ini menjadi manifestasi dari fragmentasi sinergitas di lapangan.

Kegagalan ISWM ini berdampak serius terhadap kontribusi UIN Jakarta pada *Sustainable Development Goals* (SDGs), terutama Tujuan 12 tentang Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (United Nations, 2015). Ketika pemilahan sampah di kampus tidak berjalan optimal, praktik pendidikan dan operasional kampus secara keseluruhan gagal menjadi *living lab* yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, sehingga memperlemah komitmen “Green” dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Setelah masalah utama ditetapkan, Diagram *Fishbone* (Ishikawa, 1990) digunakan untuk memetakan akar-akar penyebab fragmentasi tata kelola sampah (ISWM) yang

menghambat sinergitas. Akar masalah dikelompokkan menjadi tiga kategori utama: Kebijakan (Man), Kapasitas SDM (Method), dan Teknologi (Machine/Material).

Akar Masalah Kategori Kebijakan (Man): Ketiadaan Standar Akuntabilitas Kinerja Lingkungan (SAKL). Masalah ini merupakan isu integrasi vertikal dan horizontal (Wibisono, 2018). Kebijakan pengelolaan sampah yang ada bersifat parsial, tersebar di berbagai unit, dan tidak memiliki payung hukum setingkat Peraturan Rektor yang mewajibkan akuntabilitas kinerja lingkungan secara terpadu. Kegagalan ini melanggar prinsip dasar analisis kebijakan, di mana tujuan kebijakan (*Integrated Solid Waste Management*) tidak didukung oleh instrumen regulasi yang jelas dan mengikat (Dunn, 2018).

Akar Masalah Kategori Kapasitas SDM (Method): Terbatasnya Kapasitas SDM yang Kompeten. Tidak ada program pelatihan dan sertifikasi terstruktur bagi staf operasional maupun *middle management* di fakultas untuk menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) pemilahan sampah secara benar. Kapasitas SDM yang rendah dalam audit lingkungan dan monitoring GC menjadi kendala serius, karena mereka adalah aktor kunci di lapangan (Wijaya & Kusuma, 2020).

Akar Masalah Kategori Teknologi (Machine/Material): Pengadaan Teknologi *Ad Hoc* dan Keterbatasan *Smart Monitoring*. Infrastruktur pendukung ISWM, seperti tempat sampah terpilah dan teknologi pemantauan, sering diadakan secara *ad hoc* tanpa perencanaan terintegrasi. Hal ini menghambat *smart monitoring* yang diperlukan untuk mendapatkan data obyektif, yang pada akhirnya berkontribusi pada kesulitan evaluasi kinerja (Wibowo & Sari, I. P., 2021).

Tiga akar masalah ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan *Green Campus* secara keseluruhan tidak didukung oleh variabel komunikasi, sumber daya, dan disposisi yang jelas, sesuai dengan kerangka implementasi kebijakan klasik (Van Meter & Van Horn, 1975). Fragmentasi terjadi karena setiap fakultas memiliki interpretasi dan alokasi sumber daya yang berbeda-beda terhadap program *Green Campus*, tanpa adanya *shared vision* dan *mandated coordination*.

Analisis Kebijakan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Relevansi: Undang-undang ini memberikan landasan hukum wajib bagi setiap entitas, termasuk institusi pendidikan, untuk melaksanakan pengelolaan sampah yang komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir. Kewajiban ini mencakup pengurangan dan penanganan sampah dengan metode dan teknik yang berwawasan lingkungan. Kegagalan sinergi dalam Monev dan implementasi program di UIN Jakarta melanggar prinsip pengelolaan terpadu yang diamanatkan UU ini.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Relevansi: UU PPLH mewajibkan setiap orang dan badan hukum untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup dari pencemaran dan kerusakan. Dalam konteks kampus, ini menjadi dasar hukum bagi tanggung jawab universitas untuk memastikan bahwa pengelolaan sampahnya tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan sivitas akademika.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan

Relevansi: Meskipun tidak secara spesifik mengatur *Green Campus*, PP ini memberikan kerangka hukum bagi tata kelola dan penyelenggaraan UIN sebagai PTK. Program *Green Campus* dan pengelolaan sampah terpadu harus sejalan dengan visi dan misi PTK untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat), termasuk tanggung jawab lingkungan.

4. Peraturan Menteri Agama (PMA) terkait Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Relevansi: PMA (contohnya, Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013) menetapkan struktur organisasi, tugas, dan fungsi unit-unit di UIN. Masalah fragmentasi tata kelola (akar masalah pertama) dapat ditelusuri ke dalam PMA ini, di mana penugasan pengelolaan fasilitas dan lingkungan mungkin belum secara eksplisit diintegrasikan di bawah satu otoritas yang kuat untuk mengkoordinasikan program lintas fakultas.

5. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 1415 Tahun 2024 tentang Kebijakan Kampus Hijau (*Green Campus Policy*)

Relevansi: Ini adalah regulasi internal paling relevan yang secara eksplisit menyebutkan komitmen UIN Jakarta terhadap *Green Campus*. Keputusan ini umumnya mencakup:

- a. Tujuan untuk meningkatkan peringkat di *UI GreenMetric* (yang memiliki indikator *Waste/Pengelolaan Sampah*).
- b. Kewajiban unit/fakultas untuk meningkatkan capaian KPI dalam pemeringkatan internal.

Hubungan dengan Masalah: Ketiadaan KPI baku, Monev, dan sinergi (akar masalah) menunjukkan bahwa *Kebijakan Rektor* ini belum diimplementasikan secara efektif dan membutuhkan peraturan pelaksana yang lebih rinci (*Surat Edaran Rektor* atau *Peraturan Rektor* yang spesifik tentang SML dan Monev).

6. Surat Edaran Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tentang Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi dalam Pengelolaan Kampus Hijau

Relevansi: Surat edaran ini berfungsi sebagai panduan implementasi teknis. Keberadaan surat edaran ini menunjukkan adanya mandat untuk bertindak. Namun, kurangnya kapasitas SDM, teknologi, dan Monev menunjukkan bahwa panduan ini tidak didukung oleh alokasi sumber daya dan sistem akuntabilitas yang memadai.

7. Surat Keputusan Rektor Nomor 196 Tahun 2025 tentang Pusat Pengembangan *Green Campus* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
8. Surat Keputusan Rektor Nomor 198 Tahun 2025 tentang Tim Pelaksana pada Pusat Pengembangan *Green Campus* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Limitasi Kajian

Limitasi ini mencakup batasan lokasi, batasan fokus isu, dan batasan metodologi yang bersumber dari sifatnya sebagai analisis kebijakan.

Kebaruan/Kontribusi

Kebaruan utama dari kajian kebijakan ini terletak pada kontribusinya dalam mengatasi *gap* implementasi kebijakan lingkungan di perguruan tinggi melalui perspektif Integrasi Ganda (vertikal dan horizontal). Policy paper ini tidak hanya mendiagnosis masalah fungsional (sampah menumpuk) tetapi juga masalah struktural (fragmentasi kebijakan), dengan memberikan solusi tunggal berupa Peraturan Rektor SML Terpadu yang secara eksplisit memandatkan akuntabilitas, sistem Monev berbasis KPI, dan otoritas tunggal yang berkesinambungan. Kontribusi praktisnya adalah menyediakan cetak biru regulasi bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk bertransformasi dari sekadar memiliki program *Green Campus* menjadi institusi dengan Sistem Manajemen Lingkungan yang terintegrasi dan mengikat secara hukum di seluruh tingkatan kelembagaan.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

1. Penetapan Peraturan Rektor tentang Sistem Manajemen Lingkungan (SML) Terpadu

Alternatif kebijakan ini berupa penerbitan Peraturan Rektor yang mengesahkan SML terpadu berbasis ISO 14001/PDCA untuk *Green Campus*, dengan fokus pada pengelolaan sampah. Regulasi ini harus mewajibkan integrasi vertikal dan horizontal antara Unit Pengelola *Green Campus* dengan semua Fakultas/Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan menetapkan otoritas tunggal yang bertanggung jawab atas koordinasi, pengawasan, dan alokasi anggaran pengelolaan sampah. Tujuan utamanya adalah menghapus fragmentasi tata kelola yang ada, memastikan semua unit bekerja di bawah kerangka kerja *check-and-act* yang sama, dan memberikan mandat hukum yang kuat untuk pelaksanaan program.

2. Penerbitan Peraturan Rektor tentang Standar Akuntabilitas Kinerja Lingkungan (SAKL)

Regulasi ini berfokus pada akar masalah Monev dengan menetapkan Standar Akuntabilitas Kinerja Lingkungan (SAKL) yang spesifik melalui Peraturan Rektor. SAKL harus mewajibkan penggunaan Indikator Kinerja Utama (KPI) lingkungan yang baku dan terukur (misalnya, rasio volume sampah terpilah per total sampah, persentase pengalihan sampah dari TPA) dan mengikatnya secara langsung dengan evaluasi kinerja tahunan (SKP) manajerial pimpinan unit dan fakultas. Peraturan ini juga harus mencakup mekanisme sanksi dan *reward*, memastikan adanya konsekuensi yang jelas atas capaian atau kegagalan target kinerja pengelolaan sampah.

3. Keputusan Rektor tentang Rencana Induk Pembangunan Kapasitas dan Teknologi Hijau (RIP-KTH)

Untuk mengatasi keterbatasan SDM dan teknologi *ad hoc*, alternatifnya adalah Keputusan Rektor tentang Rencana Induk Pembangunan Kapasitas dan Teknologi Hijau (RIP-KTH). RIP-KTH harus menjadi dokumen perencanaan jangka panjang (misalnya 5 tahun) yang mewajibkan alokasi anggaran spesifik untuk: 1) Program sertifikasi dan pelatihan teknis staf Monev dan pengelolaan sampah; dan 2) Pengadaan infrastruktur teknologi terintegrasi (seperti *platform* digital terpusat dan alat ukur otomatis) untuk mendukung *smart monitoring*. Regulasi ini memastikan investasi SDM dan Teknologi bukan lagi *ad hoc* tetapi terencana dan berkelanjutan.

4. Surat Edaran Rektor tentang Kewajiban Transparansi Data Kinerja Lingkungan

Alternatif ini berfokus pada akar masalah transparansi dengan menerbitkan Surat Edaran (SE) Rektor yang mewajibkan semua unit pelaksana untuk mengunggah data kinerja pengelolaan sampah secara *real-time* ke *platform* digital yang dapat diakses publik (kampus). SE ini harus menetapkan frekuensi pelaporan minimum (misalnya bulanan) dan format data yang seragam. Regulasi ini bertujuan menciptakan mekanisme akuntabilitas publik dan mendorong keterlibatan sivitas akademika dalam melakukan pengawasan, sekaligus memberikan *pressure* positif bagi unit pelaksana untuk memperbaiki kinerja.

5. Keputusan Rektor tentang Tim Konsorsium Pengelolaan Sampah dan *Living Laboratory*

Untuk menjembatani kesenjangan antara kebijakan dan penelitian, alternatifnya adalah Keputusan Rektor yang membentuk Tim Konsorsium Pengelolaan Sampah UIN Jakarta. Konsorsium ini diwajibkan melibatkan dosen, mahasiswa, dan ahli teknis untuk merancang dan mengelola fasilitas pengolahan sampah kampus sebagai *Living Laboratory* (Laboratorium Hidup). Regulasi ini memastikan bahwa kebijakan pengolahan sampah didasarkan pada riset aplikatif internal dan menjadi media praktis untuk meningkatkan kompetensi dan inovasi mahasiswa serta staf secara berkelanjutan.

Tabel 2. Analisis Alternatif Kebijakan Berdasarkan Teori William N. Dunn

No	Alternatif Kebijakan	Efektifitas	Efisiensi	Kekukupan	Responsivitas	Total
1	Peraturan Rektor Sistem Manajemen Lingkungan (SML) Terpadu (Tata Kelola)	5	3	5	4	17
2	Peraturan rektor SAKL (KPI & Akuntabilitas)	4	4	4	3	15
3	Keputusan Rektor RIP-KTH (SDM & Teknologi)	4	2	5	4	15
4	SE Rektor Transparansi Data <i>Real-Time</i>	3	5	3	5	16
5	Keputusan Rektor Konsorsium & <i>Living La</i>	3	3	4	5	15

Alternatif yang paling diprioritaskan untuk diterapkan pertama kali adalah Peraturan Rektor tentang Sistem Manajemen Lingkungan (SML) Terpadu (Total Skor 17). Regulasi ini menyediakan fondasi tata kelola dan kerangka kerja (PDCA) yang sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa kebijakan lain, seperti SAKL (KPI) dan RIP-KTH (SDM/Teknologi), dapat diimplementasikan secara sinergis dan berkelanjutan.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Kajian ini menyimpulkan bahwa lemahnya implementasi program *Green Campus* (GC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, khususnya dalam sistem Pengelolaan Sampah Terpadu (*Integrated Solid Waste Management—ISWM*), disebabkan oleh masalah struktural kelembagaan: fragmentasi sinergitas dan ketiadaan Standar Akuntabilitas Kinerja Lingkungan (SAKL) yang mengikat. Berdasarkan analisis USG, masalah kebijakan utama yang paling mendesak adalah kesulitan dalam mengevaluasi kinerja program GC secara objektif. Akar kausalitas masalah ini berpusat pada tidak adanya payung hukum setingkat Peraturan Rektor yang memaksa integrasi vertikal dan horizontal antar

fakultas dan unit. Kondisi ini menghambat siklus *Plan-Do-Check-Act* (PDCA) dan menyebabkan kegagalan pemilahan sampah di sumber, yang berimplikasi pada rusaknya citra dan komitmen keberlanjutan universitas (Dunn, 2018; Wibisono, 2018).

Berdasarkan evaluasi komparatif terhadap lima alternatif kebijakan, rekomendasi yang paling efektif, efisien, dan layak adalah Penerbitan Peraturan Rektor tentang Sistem Manajemen Lingkungan (SML) Terpadu. Intervensi kebijakan ini memiliki skor tertinggi karena secara langsung mengatasi akar masalah dengan menyediakan otoritas tunggal, payung hukum yang mengikat, dan SAKL berbasis Key Performance Indicator (KPI). Peraturan Rektor ini harus memastikan bahwa seluruh unit mengadopsi PDCA, mengintegrasikan alokasi SDM dan teknologi *smart monitoring* ke dalam kebijakan penganggaran, serta menetapkan mekanisme insentif dan sanksi untuk menjamin partisipasi kolektif (Ansell & Gash, 2008).

Implikasi dari kebijakan ini adalah transformasi tata kelola dari upaya sukarela yang terfragmentasi menjadi Sistem Manajemen Lingkungan yang wajib dan akuntabel. Dengan adanya regulasi yang kuat, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tidak hanya memperbaiki efisiensi ISWM dan meningkatkan peringkat GreenMetric, tetapi juga secara efektif mewujudkan visi universitas sebagai institusi "Green and Humanity" yang berkontribusi nyata pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di sektor pendidikan tinggi (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

Rekomendasi

Berdasarkan alternatif kebijakan yang terpilih di atas, maka direkomendasikan kepada Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menerbitkan Peraturan Rektor tentang Sistem Manajemen Lingkungan (SML) Terpadu *Green Campus*. Regulasi ini harus menjadi payung hukum utama yang menetapkan struktur tata kelola otoritas tunggal untuk pengelolaan sampah terpadu, mewajibkan penerapan siklus PDCA (*Plan-Do-Check-Act*) di semua unit, serta mengintegrasikan secara eksplisit kewajiban pengembangan KPI dan alokasi sumber daya untuk SDM dan teknologi Monev, sehingga secara fundamental mengatasi akar masalah fragmentasi, ketiadaan regulasi pengikat, dan lemahnya sistem akuntabilitas.

REFERENSI

- Alshuwaikhat, H. M., & Abubakar, I. (2008). An integrated approach to achieving campus sustainability: Assessment of the current campus environmental management practices. *Journal of Cleaner Production*, 16(16), 1777–1785.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Arif, M., Yustisiani, A., & Hermawan, D. (2020). Green Campus Policy and Waste Management at Public Universities in Indonesia. *Journal of Governance and Public Policy*, 7(1), 1-15.
- Azizah, N. (2022). Pengaruh pemilahan sampah di sumber terhadap efisiensi operasional pengolahan sampah. *Jurnal Teknik Lingkungan*, 15(1), 45–58.
- Azmi, M., Syafi'i, I., & Rahman, A. (2022). Strategi pengelolaan sampah di lingkungan kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menuju *Green Campus*. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 20(3), 1–10.

- Baky, M. S. A., El-Haggar, S. M., & ElGohary, S. E. (2023). Developing a framework for smart sustainable campus implementation utilizing big data analytics and BIM technology. *Sustainable Cities and Society*, 89, 104279.
- Bappenas. (2018). *Panduan penyusunan rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah berkelanjutan*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Damanhuri, E., & Wahyono, S. (2019). *Pengelolaan sampah*. Bandung: Penerbit ITB.
- Dewi, P. S., & Putra, M. D. (2023). The Role of Information Technology Master Plan in Supporting Integrated Waste Management in University Campus. *Journal of Information Systems Engineering and Business Intelligence*, 9(1), 12-24.
- Disterheft, A., Caeiro, S., Azeiteiro, U., & Leal Filho, W. (2012). Key performance indicators for sustainability assessment in higher education institutions: From a literature review to a necessary common framework. *Ecological Indicators*, 16, 10-21.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis* (6th ed.). Routledge.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1-29.
- Firdaus, R. (2019). *Dampak implementasi kebijakan Green Campus terhadap citra perguruan tinggi*. (Tesis Magister, Universitas Indonesia).
- Freeman, R. E. (2010). *Strategic management: A stakeholder approach*. Cambridge University Press.
- Green, T., & Parnel, J. (2020). The PDCA cycle as a mechanism for continuous environmental performance. *Journal of Cleaner Production*, 330, 129758.
- Hadi, S. (2017). Implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 20(1), 1-15.
- Hardjono, R. (2017). *Manajemen lingkungan perguruan tinggi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hartono, A. (2019). Peran bank sampah dalam sistem ekonomi sirkular kampus. *Prosiding Seminar Nasional Lingkungan*, 4(1), 120-135.
- Hasanah, U., Ramadhan, A., & Pratiwi, D. (2022). Developing Key Performance Indicators for Sustainable Waste Management in Higher Education Institutions. *Journal of Environmental Science and Technology*, 15(2), 101-115.
- Hermawan, H., & Lazuardi, B. (2021). Organizational Culture and Green Campus Reporting: The Dilemma Between Image Maintenance and Transparency. *International Journal of Environmental and Science Education*, 16(3), 205-218.
- Hidayat, R., Purwanto, B., & Wardhani, M. (2023). Measuring Green Campus Performance: Challenges in Developing Integrated Waste Management Key Performance Indicators. *International Journal of Environmental Monitoring and Analysis*, 11(3), 56-62.
- International Organization for Standardization (ISO). (2015). *ISO 14001: Environmental management systems—Requirements with guidance for use*. ISO.
- Ishikawa, K. (1990). *Introduction to quality control*. 3A Corporation.

- Jannah, M. (2019). Penguatan tata kelola lingkungan pada institusi pendidikan Islam. *Jurnal Studi Islam*, 10(2), 115–130.
- Kamaruddin, M., Susanti, L., & Wijaya, T. (2022). Institutional Fragmentation as a Barrier to Integrated Green Campus Implementation: A Case Study on Waste Management. *Asian Journal of Sustainable Development and Planning*, 5(2), 112-125.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2020). *Pedoman teknis pengelolaan sampah di lingkungan institusi pendidikan*. Jakarta: KLHK.
- Lozano, R. (2013). *Theory and future of the Green Campus: A systematic analysis and critique*. *Journal of Cleaner Production*, 49, 1-13.
- Lozano, R., Lukman, R., Dale, A., & Ceulemans, K. (2013). Beyond the Earth Summit: More powerful technologies, new policies, and higher education. *Sustainability*, 5(10), 4537-4554.
- Lukman, R., Disterheft, A., & Toman, I. (2017). The Role of Education and Training in Fostering Sustainability Competencies in Higher Education Institutions. *International Journal of Sustainability in Higher Education*, 18(6), 940-955.
- Meadows, D. H. (2008). *Thinking in systems: A primer*. Chelsea Green Publishing.
- Mustafa, R., & Nurhasanah, S. (2021). The Economic Dimension of Green Campus: Financial Constraints in Sustainable Waste Management. *Indonesian Journal of Environmental Science*, 18(4), 487-495.
- Mustofa, A. (2018). Peran mahasiswa dalam gerakan zero waste di kampus. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 20–30.
- Nugroho, A., & Handayani, P. W. (2019). Development of Sustainable Performance Indicators for University Waste Management: A Circular Economy Perspective. *International Journal of Waste Resources*, 9(3), 365-374.
- Prasetyo, A., & Wulandari, R. (2019). Human Resource Management Challenges in Green Campus Implementation: Motivation and Career Path. *International Journal of Higher Education*, 8(5), 187-198.
- Pratama, I. (2021). *Transparansi dan akuntabilitas kebijakan lingkungan di perguruan tinggi*. (Disertasi Doktor, Universitas Gadjah Mada).
- Purwaningrum, P. (2016). *Isu dan tantangan pengelolaan sampah perkotaan*. Yogyakarta: Penerbit Media Komunikasi.
- Puspitasari, S. (2021). Peran koordinasi dalam efektivitas kebijakan Green Campus di perguruan tinggi. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(1), 50–65.
- Ristiani, M. (2023). *Evaluasi kebijakan Green Campus dan model implementasi yang berkelanjutan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sanjaya, D., & Rismayadi, Y. (2022). The Role of Digital Platforms in Enhancing Transparency of University Waste Management Data. *Journal of Applied Informatics and Computing*, 6(1), 55-68.
- Sari, D. (2020). Analisis keberlanjutan finansial program pengelolaan sampah 3R di lingkungan kampus. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 25(3), 190–205.
- Sartika, I., & Santoso, B. (2023). Challenges in Translating Global Sustainability Frameworks to Local Institutional KPIs in Indonesian Higher Education. *Journal of Applied Environmental Management*, 21(1), 45-58.

- Setiawan, B. (2020). Pengurangan sampah plastik di area kantin kampus: Tinjauan kebijakan dan perilaku. *Jurnal Manajemen Lingkungan*, 5(2), 80–95.
- Setyawati, R., Firdaus, Y., & Haryati, S. (2020). Stakeholder Engagement in Developing Key Performance Indicators for Green Campus Implementation. *Environmental Management and Sustainable Development*, 9(2), 112-125.
- Siregar, R., & Susilo, B. (2018). Linking Sustainability Performance to Managerial Accountability: A Policy Framework for Indonesian Higher Education. *Journal of Public Administration and Governance*, 8(4), 112-124.
- Sukmana, C. (2022). Melembagakan rasa kepemilikan kolektif dalam program kampus hijau. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 60–75.
- Suparman, A., & Hidayat, R. (2021). *Studi kasus kegagalan pemilahan sampah di institusi pendidikan*. Bandung: Penerbit Pustaka Cendekia.
- Suryani, F. (2020). Transparency and Accountability in Green Campus Initiatives: A Policy Framework for Indonesian Universities. *Asian Journal of Educational Research and Reviews*, 8(3), 256-267.
- Syafi'i, I. (2020). Model tata kelola lingkungan terkoordinasi di kampus berbasis UI GreenMetric. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 13(2), 88–105.
- Tchobanoglous, G., Theisen, H., & Vigil, S. (2015). *Integrated solid waste management: Engineering principles and management issues* (3rd ed.). McGraw-Hill Education.
- Teixeira, R. J., Jabbour, C. J. C., & Jabbour, A. B. L. S. (2022). Sustainable human resource management and green campus: A framework for improving environmental performance. *Journal of Cleaner Production*, 330, 129758.
- UI GreenMetric. (2024). *UI GreenMetric world university rankings 2024*. Diakses dari [Situs resmi UI GreenMetric].
- UI GreenMetric. (2024). *UI GreenMetric world university rankings 2024*. Diakses dari [Situs resmi UI GreenMetric].
- UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. (2023). *Rencana strategis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2020-2024*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. (2023). *Rencana strategis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2020-2024*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*. New York: United Nations.
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*. New York: United Nations.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.
- Wibisono, M. (2018). Pentingnya integrasi vertikal dan horizontal dalam implementasi kebijakan publik. *Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik*, 6(1), 1–18.
- Wibisono, M. (2018). Pentingnya integrasi vertikal dan horizontal dalam implementasi kebijakan publik. *Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik*, 6(1), 1–18.

- Wibowo, A., & Sari, I. P. (2021). The Role of Human Resources Capacity and Information Technology in Environmental Performance Monitoring at Universities. *International Journal of Environmental Monitoring and Analysis*, 9(4), 88–95.
- Wibowo, A., & Sari, I. P. (2021). The Role of Human Resources Capacity and Information Technology in Environmental Performance Monitoring at Universities. *International Journal of Environmental Monitoring and Analysis*, 9(4), 88–95.
- Wijaya, T., & Kusuma, S. B. (2020). The Urgency of Specialized Training and Certification for University Staff in Environmental Auditing and Green Campus Monitoring. *Sustainable Environment Research*, 30(4), 211–225.
- Wijaya, T., & Kusuma, S. B. (2020). The Urgency of Specialized Training and Certification for University Staff in Environmental Auditing and Green Campus Monitoring. *Sustainable Environment Research*, 30(4), 211–225.
- Wiryo, A. (2019). *Pengelolaan limbah terpadu*. Deepublish.
- Wiryo, A. (2019). *Pengelolaan limbah terpadu: Konsep dan implementasi*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Yusuf, A., & Kurniawan, H. (2019). Integrating Local Wisdom and Academic Research for Sustainable Waste Management in University Campuses. *The International Journal of Learning and Change*, 11(2), 99–114.